

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MADE ASTIKA

NIK : 5108063112640013

Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jabatan : KEPALA DINAS

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 24 Januari 2023

Catatan

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkn@kpk.go.id | <https://elhkn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membatasi email ini.



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 374/HK/2023

TENTANG
PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan Laporan harta kekayaan;
- d. bahwa dengan adanya perubahan Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka Keputusan Bupati Nomor 700/149/HK/2022 tentang Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7.2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidapatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7.6

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/SJ tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mengisi formulir/blangko E-LHKPN dan menyetor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
- KETIGA** : Bagi Pejabat yang tidak melaporkan Harta Kekayaannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/149/HK/2022 tentang Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Juli 2023
PENYABAT BUPATI BULELENG,


Made Bayu Wintogin, S.H.
NIP. 19810117 200803 1 001



KETUA LHADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Gubernur Bali;
4. Penjabat Bupati Buleleng;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
10. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 100.3.3.2/ 374 /HK/2023
 TENTANG
 PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

No	Unit Kerja	Nama	NIP	Jabatan	Eselon
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	Drs. Gede Suyasa, M.Pd	196707101992031014	Sekretaris Daerah	II.a
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	Ni Made Rousmini, S.Sos, M.AP	196505261985032005	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	II.b
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Made Arya Sukerta, S.H, M.H	196412171985031007	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	II.b
4	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Drs I Made Budi Astawa, M.Si	196312311992031207	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	II.b
5	Sekretariat DPRD	I Gede Sandhiyasa, S.Sos.M.Si	196507041986021009	Sekretaris DPRD	II.b
6	Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	I Putu Karuna, SH	196206021994031011	Inspektur Daerah	II.b
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Putu Ariadi Pribadi, S.S.T.P.,M.AP	198012121999121001	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.b
8	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Drs Made Supartawan, M.M	197307071993021002	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	II.b
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos, M.AP	197208091992012002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II.b

72

10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Drs Gede Sugiarta Widiada, M.Si	196703021989011001	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	II.b
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komang Kappa Tri Aryandono, S.I.P	198009022008041001	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.b
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	I Gede Wisnawa, SH	196312061993021005	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II.b
13	Satuan Polisi Pamong Praja	I Gede Arya Suradnyana, Ap, M.M	197403231993111001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II.b
14	Rumah Sakit Umum Daerah	dr Putu Arya Nugraha, Sp,PD	197506012002121009	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	II.b
15	Dinas Perhubungan	Gede Gunawan Adnyana Putra, SE M.Si	196608061993031009	Kepala Dinas Perhubungan	II.b
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Made Era Oktarini, S.S.T.P.,M.M	197510202000032005	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	II.b
17	Dinas Tenaga Kerja	Drs Komang Sumertajaya	196403111985031017	Kepala Dinas Tenaga Kerja	II.b
18	Dinas Kesehatan	Dr Sucipto, S.Ked, M.AP	197001162003121005	Kepala Dinas Kesehatan	II.b
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Ketut Suwarmawan, S.S.T.P, M.AP	198107112001121002	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	II.b
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I Nyoman Riang Pustaka, S.I.P	197502181993111001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.b

21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Made Juartawan, S.S.T.P,M.M	198006102000121001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.b
22	Dinas Pemadam Kebakaran	I Made Subur, S.H	196310081992031008	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	II.b
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Nyoman Agus Jaya Sumpena, S.E	196308011992011001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.b
24	Dinas Pertanian	Ir. I Made Sumiarta,	196502151997031003	Kepala Dinas Pertanian	II.b
25	Dinas Kebudayaan	Drs I Nyoman Wisandika	196610081998031001	Kepala Dinas Kebudayaan	II.b
26	Dinas Pariwisata	Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	197510091993111001	Kepala Dinas Pariwisata	II.b
27	Dinas Lingkungan Hidup	Gede Melandrat, S.P	197207121998031010	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	II.b
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	I Gede Putra Aryana, S.Sos, M.AP	197005151993031010	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	II.b
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I Made Kuta, S.Sos	197007101992031007	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.b
30	Dinas Sosial	I Putu Kariaman, S.Sos	196912311991031053	Kepala Dinas Sosial	II.b
31	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Drs Dewa Made Sudiarta	197410141993111001	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II.b
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	I Putu Adiptha Ekaputra, S.T, M.M	197406102000031009	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II.b
33	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Ni Nyoman Surattini, S.T	196701021998032003	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	II.b

34	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	I Made Astika, S.Pd, M.M	196412311988031236	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	II.b
35	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	Drs. Nyoman Widiartha	197201131991011001	Kepala Bagian Pemerintahan	III.a
36	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Made Bayu Waringin, S.H, M.H	198107162008031001	Kepala Bagian Hukum	III.a
37	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ni Nyoman Sukadani, S.Sos	197204231994032002	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	III.a
38	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Pembangunan	I Nengah Budiarta, S.T.M.T	196911091999031007	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan	III.a
39	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	I Made Sudarmika, M.T	198504172010011020	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	III.a
40	Sekretariat Daerah Bagian Umum	Made Pasda Gunawan, S.Sos.M.AP	198702102010011016	Kepala Bagian Umum	III.a
41	Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nyoman Agus Tri Kartika Yuda, S.I.P, M.Si	198608212007011001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	III.a
42	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Drs. I Dw AA Sri Ambarawati	196606171986022003	Kepala Bagian Organisasi	III.a
43	Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	Putu Arimbawa, S.E, M.Si	197311241999031004	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	III.a
44	Sekretariat DPRD Bagian Umum	Nyoman Ary Juru, S.H, M.AP	197410011999031007	Kepala Bagian Umum	III.a
45	Sekretariat DPRD Bagian Keuangan	Gede Wardana, S.T, M.AP	197911272006041014	Kepala Bagian Keuangan	III.a
46	Sekretariat DPRD Bagian Hukum dan Persidangan	Putu Darma Sanjaya, S.H	196612091994031008	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan	III.a
47	Sekretariat DPRD Bagian Bagian Pengawasan dan Humas	Ir. Nyoman Budi Utama	196610062006041008	Kepala Bagian Bagian Pengawasan dan Humas	III.a
48	Kecamatan Tejakula	I Gede Suyasa, S.P	197008261998031004	Camat Tejakula	III.a

7.c

49	Kecamatan Sawan	I Made Wirama Satria, S.E	198010292003121007	Camat Sawan	III.a
50	Kecamatan Buleleng	I Made Dwi Adnyana, S.S.T.P, M.AP	197612281996011001	Camat Buleleng	III.a
51	Kecamatan Sukasada	Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana	196801151989031011	Camat Sukasada	III.a
52	Kecamatan Banjar	I Made Mardika, S.E	196706251986021001	Camat Banjar	III.a
53	Kecamatan Seririt	I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.S.T.P., M.M	198003271998101001	Camat Seririt	III.a
54	Kecamatan Busungbiu	Gede Kurniawan, S.S.T.P	198105291999121001	Camat Busungbiu	III.a
55	Kecamatan Gerokgak	Ketut Aryawan, S.S.T.P.M.M	198303212002121001	Camat Gerokgak	III.a
56	Desa Sumbeklampok	I Wayan Sawitra Yasa		Perbekel Desa Sumbeklampok	
57	Desa Pejarakan	I Made Astawa		Perbekel Desa Pejarakan	
58	Desa Sumberkima	I Nengah Wirta		Perbekel Desa Sumberkima	
59	Desa Pemuteran	Nyoman Arnawa		Perbekel Desa Pemuteran	
60	Desa Banyupoh	Ketut Bijaksana		Perbekel Desa Banyupoh	
61	Desa Penyabangan	Nyoman Sudiarta		Perbekel Desa Penyabangan	
62	Desa Musi	Nyoman Arya Swabawa		Perbekel Desa Musi	
63	Desa Sanggalangit	I Nyoman Sudika		Perbekel Desa Sanggalangit	
64	Desa Gerokgak	I Nyoman Wijaya		Perbekel Desa Gerokgak	
65	Desa Patas	I Kadek Sara Adnyana,S.Pd		Perbekel Desa Patas	
66	Desa Pengulon	Drs. I Nyoman Juliana		Perbekel Desa Pengulon	
67	Desa Tinga-tinga	I Komang Adi Wirawan		Perbekel Desa Tinga-tinga	
68	Desa Celukanbawang	Muhajir		Perbekel Desa Celukanbawang	
69	Desa Tukadsumaga	I Made Gelgel		Perbekel Desa Tukadsumaga	
70	Desa Unggahan	I Ketut Nasa		Perbekel Desa Unggahan	
71	Desa Ularan	I Gusti Nyoman Suryawan		Perbekel Desa Ularan	

72	Desa Ringdikit	I Made Sumadi		Perbekel Desa Ringdikit
73	Desa Rangdu	Komang Budi Adnyana		Perbekel Desa Rangdu
74	Desa Mayong	Made Astawa, S. Sn.		Perbekel Desa Mayong
75	Desa Gunungsari	Ketut Pastika, S.H		Perbekel Desa Gunungsari
76	Desa Munduk Bestala	I Putu Sriyasa, S.H.		Perbekel Desa Munduk Bestala
77	Desa Bestala	Bambang Erawan		Perbekel Desa Bestala
78	Desa Kalianget	Ketut Nanda Kusuma		Perbekel Desa Kalianget
79	Desa Joanyar	Nyoman Mas Nesa		Perbekel Desa Joanyar
80	Desa Tangguwisia	Putu Ngurah Budi Utama		Perbekel Desa Tangguwisia
81	Desa Sulayah	Agus Suhardana		Perbekel Desa Sulayah
82	Desa Bubunan	Ketut Gunarsana		Perbekel Desa Bubunan
83	Desa Patemon	I Ketut Winaya		Perbekel Desa Patemon
84	Desa Pengastulan	Putu Widyasmita		Perbekel Desa Pengastulan
85	Desa Lokapaksa	Putu Dodik Tryana		Perbekel Desa Lokapaksa
86	Desa Pangkungparuk	Ketut Sudiarsana, S.E		Perbekel Desa Pangkungparuk
87	Desa Banjarasem	I Made Sirsa, S.Pd., M.Pd		Perbekel Desa Banjarasem
88	Desa Kalisada	Wayan Widistra		Perbekel Desa Kalisada
89	Desa Umeanyar	Putu Edy Mulyana, S.E		Perbekel Desa Umeanyar
90	Desa Sepang	I Putu Agung Mahardika		Perbekel Desa Sepang
91	Desa Dapdap Putih	I Gede Marjaya		Perbekel Desa Dapdap Putih
92	Desa Bongancina	Dewa Made Sariana		Perbekel Desa Bongancina
93	Desa Pucaksari	I Ketut Maliani		Perbekel Desa Pucaksari
94	Desa Telaga	Made Hendra Mahayuda, S.Pd		Perbekel Desa Telaga
95	Desa Titab	I Wayan Suastika		Perbekel Desa Titab
96	Desa Subuk	Ketut Suliada Kusana		Perbekel Desa Subuk
97	Desa Tinggarsari	Ketut Samiasa		Perbekel Desa Tinggarsari

98	Desa Kedis	Nengah Suparna, S.H.M.Pd	Perbekel Desa Kedis
99	Desa Kekeran	Komang Eva Wahyu Diatmika,	Perbekel Desa Kekeran
100	Desa Busungbiu	Ketut Suartama	Perbekel Desa Busungbiu
101	Desa Pelapuan	Gede Agus Armika Yasa	Perbekel Desa Pelapuan
102	Desa Bengkel	Putu Artana .S.E.M.Si	Perbekel Desa Bengkel
103	Desa Umejero	Gede Adis	Perbekel Desa Umejero
104	Desa Sepang Kelod	Ketut Ngurah	Perbekel Desa Sepang Kelod
105	Desa Bayuseri	I Nyoman Witada	Perbekel Desa Bayuseri
106	Desa Tirtasari	Gde Riasa	Perbekel Desa Tirtasari
107	Desa Kayuputih	Kadek Dina Nuriani	Perbekel Desa Kayuputih
108	Desa Banyuatis	I Gede Muliarta	Perbekel Desa Banyuatis
109	Desa Gesing	Kadek Wira Wicaksana	Perbekel Desa Gesing
110	Desa Munduk	I Nengah Sudira, S.H (Paw)	Perbekel Desa Munduk
111	Desa Gobleg	I Made Separsa	Perbekel Desa Gobleg
112	Desa Pedawa	Putu Mardika,S.H.	Perbekel Desa Pedawa
113	Desa Cempaga	Putu Suarjaya	Perbekel Desa Cempaga
114	Desa Sidetapa	Ketut Budiasa,S.Pd.Sd	Perbekel Desa Sidetapa
115	Desa Tampekan	Komang Sari Darmawati,S.Sos	Perbekel Desa Tampekan
116	Desa Banjar Tegeha	Ida Bagus Komang Sistiadi	Perbekel Desa Banjar Tegeha
117	Desa Banjar	Ida Bagus Dedy Suyasa	Perbekel Desa Banjar
118	Desa Dencarik	Ni Luh Kertawati (Paw)	Perbekel Desa Dencarik
119	Desa Temukus	Drs.I Made Karuna	Perbekel Desa Temukus
120	Desa Tigawasa	I Made Suadarmayasa	Perbekel Desa Tigawasa
121	Desa Kaliasem	Ketut Sukiarta	Perbekel Desa Kaliasem
122	Desa Pancasari	I Wayan Komiarsa	Perbekel Desa Pancasari
123	Desa Wanagiri	Made Suparanton, S.S.	Perbekel Desa Wanagiri
124	Desa Ambengan	Nyoman Seri	Perbekel Desa Ambengan

125	Desa Gitgit	I Putu Arcana		Perbekel Desa Gitgit
126	Desa Pegayaman	A. Asyghor Ali		Perbekel Desa Pegayaman
127	Desa Silangjana	Komang Suparma		Perbekel Desa Silangjana
128	Desa Pegadungan	Ketut Sudiara		Perbekel Desa Pegadungan
129	Desa Padangbulia	I Gusti Nyoman Suparwata		Perbekel Desa Padangbulia
130	Desa Sambangan	Nyoman Sudarsana		Perbekel Desa Sambangan
131	Desa Panji	Md. Ariawan, S.S.TPar.,		Perbekel Desa Panji
132	Desa Panji Anom	I Nyoman Mustanda		Perbekel Desa Panji Anom
133	Desa Tegallinglah	I Ketut Mudarna, S.Sos.		Perbekel Desa Tegallinglah
134	Desa Selat	Putu Mara		Perbekel Desa Selat
135	Desa Kayuputih	Gede Geigel Ariawan		Perbekel Desa Kayuputih
136	Desa Kalibubuk	Ketut Suka, S.Sos		Perbekel Desa Kalibubuk
137	Desa Anturan	I Ketut Soka, S.Pd		Perbekel Desa Anturan
138	Desa Tukadmungga	I Putu Madia		Perbekel Desa Tukadmungga
139	Desa Pamaron	Putu Mertayasa		Perbekel Desa Pamaron
140	Desa Baktiseraga	Gusti Putu Armada, Ak		Perbekel Desa Baktiseraga
141	Desa Sari Mekar	Ketut Reka Budiarta		Perbekel Desa Sari Mekar
142	Desa Nagasepaha	I Wayan Sumeken, S.Sos.		Perbekel Desa Nagasepaha
143	Desa Petandakan	Wayan Joni Arianto		Perbekel Desa Petandakan
144	Desa Alasangker	I Wayan Sitama		Perbekel Desa Alasangker
145	Desa Poh Bergong	Wayan Wagia, S.Sos		Perbekel Desa Poh Bergong
146	Desa Jinengdalem	Ketut Mas Budarma		Perbekel Desa Jinengdalem
147	Desa Penglatan	Nyoman Budarsa		Perbekel Desa Penglatan
148	Desa Lemukih	Drs. I Nyoman Singgih		Perbekel Desa Lemukih
149	Desa Galungan	I Nyoman Suksema		Perbekel Desa Galungan
150	Desa Sekumpul	Made Suarta		Perbekel Desa Sekumpul
151	Desa Bebetin	I Gede Susanta		Perbekel Desa Bebetin

152	Desa Sudaji	I Made Ngurah Fajar Kurniawan, S.E		Perbekel Desa Sudaji	
153	Desa Sawan	Nyoman Wira		Perbekel Desa Sawan	
154	Desa Menyali	I Made Jaya Harta		Perbekel Desa Menyali	
155	Desa Suwug	Ketut Suadnyana, S.E		Perbekel Desa Suwug	
156	Desa Jagaraga	Nyoman Partha, Sh		Perbekel Desa Jagaraga	
157	Desa Sinabun	Nyoman Sumenada		Perbekel Desa Sinabun	
158	Desa Kerobokan	Putu Wisnu Wardana		Perbekel Desa Kerobokan	
159	Desa Sangsit	Putu Arya Suyasa		Perbekel Desa Sangsit	
160	Desa Bungkulan	I Ketut Kusuma Ardana, S.T.P		Perbekel Desa Bungkulan	
161	Desa Giri Emas	Wayan Saputra		Perbekel Desa Giri Emas	
162	Desa Tambakan	I Gede Eka Wandana		Perbekel Desa Tambakan	
163	Desa Pakisan	I Gede Wijaya		Perbekel Desa Pakisan	
164	Desa Bontihing	I Gede Pawata		Perbekel Desa Bontihing	
165	Desa Tajun	I Gede Agustawan, S.H		Perbekel Desa Tajun	
166	Desa Tunjung	I Made Sadia		Perbekel Desa Tunjung	
167	Desa Depeha	I Gede Srinyarnya		Perbekel Desa Depeha	
168	Desa Tamblang	I Made Diarsa, S.E		Perbekel Desa Tamblang	
169	Desa Bulian	I Made Sudirsa		Perbekel Desa Bulian	
170	Desa Bila	I Ketut Citarja Yudiarta		Perbekel Desa Bila	
171	Desa Bengkala	I Made Astika		Perbekel Desa Bengkala	
172	Desa Kubutambahan	Gede Pariadnyana		Perbekel Desa Kubutambahan	
173	Desa Bukti	Gede Wardana		Perbekel Desa Bukti	
174	Desa Mengening	Ketut Angga Wirayuda, S.H		Perbekel Desa Mengening	
175	Desa Sembiran	I Nengah Sariada		Perbekel Desa Sembiran	

72

176	Desa Pacung	Gede Kardiana		Perbekel Desa Pacung
177	Desa Julah	I Wayan Suastika S.Sos		Perbekel Desa Julah
178	Desa Madenan	Gede Mustika		Perbekel Desa Madenan
179	Desa Bondalem	Gede Arya Odantara, S.H, M.M (Paw)		Perbekel Desa Bondalem
180	Desa Tejakula	Gede Diarsa, S.P		Perbekel Desa Tejakula
181	Desa Les	Gede Adi Wistara, S.H		Perbekel Desa Les
182	Desa Penuktukan	Komang Gangga Prebawa		Perbekel Desa Penuktukan
183	Desa Sambirenteng	Komang Agus Swastika		Perbekel Desa Sambirenteng
184	Desa Tembok	Dewa Komang Yudi Astara		Perbekel Desa Tembok


 PENJABAT BUPATI BULELENG,
 KETUA LIHADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Warningsih, S.H.
 NIP. 198101191995031001